


Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Implementasi Kurikulum Pada Pendidikan Dan Pengembangan Umum Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hartini, Rugaiyah, R. Madhakomala
Mahasiswa S3 UNJ

Article Info Article history: Received : 17 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022	Abstrak <i>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) memperoleh gambaran ketepatan kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan, (2) menganalisis keberhasilan, kelemahan dan masalah ketepatan dan penggunaan kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan dan, (3) menyampaikan rekomendasi tentang langkah-langkah terintegrasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kurikulum sesuai kebutuhan pendidikan di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dengan kajian pustaka dengan berbagai sumber data baik berupa buku atau artikel yang berhubungan dengan tema penelitian.</i>
Keywords: <i>supervision, control and evaluation</i>	
Article Info Article history: Received : 17 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022	Abstract <i>The objectives of this study are (1) to obtain an overview of the accuracy of the curriculum in the implementation of education, (2) to analyze the successes, weaknesses and problems of the accuracy and use of the curriculum in the implementation of education and, (3) to provide recommendations on integrated steps that can be taken for improvement. curriculum according to future educational needs. The research method used is a literature review with various data sources in the form of books or articles related to the research theme.</i>
	<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>
Corresponding Author Hartini Mahasiswa S3 UNJ	

1. PENDAHULUAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Polri terus meningkat, saat implementasi 100 hari kerja program Presisi. Hal itu berdasarkan dari hasil penilaian lembaga survei nasional yang kredibel. Berdasarkan lembaga survei Alvara Strategi Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap Polri sebesar 86,5 persen. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya dari hasil lembaga survei lain sebesar 70,8 persen.

Untuk mempertahankan peringkat tersebut maka setiap lini di dalam Polri terus berusaha untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kredibilitasnya. Salah satu lembaga yang ada dalam tubuh Polri yaitu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri merupakan unsur pendukung pelaksana pendidikan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan kepolisian dalam rangka “Menciptakan Insan Tri Brata yang Presisi”, berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen pendidikan di jajaran Lemdiklat Polri. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dipimpin seorang berpangkat Komisaris Jenderal Polisi, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Biro yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Biro Renmin, Biro Bindiklat, Biro Kurikulum dan Biro Jianbang), Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri bertempat di Jl. Ciputat Raya No.40, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Lemdiklat Polri merupakan garda terdepan dalam membentuk, mencetak pola pikir, pola tindak sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat vital keberadaannya. Kalemndiklat Polri saat ini Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si dalam Musrenbang Polri T.A. 2021 menegaskan bahwa sumber daya manusia merupakan alat dan kekuatan utama Polri, sebagaimana persenjataan yang menjadi alat dan kekuasaan utama TNI. Sehingga pendidikan menjadi aspek penting dalam memproduksi alat utama Polri yang unggul, kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 dan juga dalam menghadapi pandemi global Covid-19. Oleh karenanya pendidikan yang diselenggarakan di kampus-kampus Polri harus dibenahi dan memosisikan sebagai objek vital Polri.

Lemdiklat Polri mempunyai delapan program prioritas transformasi pendidikan Polri tercantum dalam Kep Kalemndiklat Polri No. 323 Tanggal 21 Juni 2021 yaitu:

- a. Mewujudkan kampus sehat.
- b. Mewujudkan kampus aman.
- c. Mewujudkan kampus sebagai pusat keunggulan.
- d. Menjadikan kampus tempat favorit dan prestasi.
- e. Membangun kampus dengan kurikulum kekinian dan menjawab tantangan tugas.
- f. Membangun kampus dengan struktur kuat.
- g. Membangun kampus dengan kebangsaan.
- h. Mewujudkan pendidikan tinggi ilmu kepolisian yang inklusif untuk umat manusia.

Untuk mendukung delapan program prioritas Lemdiklat Polri, maka biro kurikulum Lemdiklat Polri memberikan terobosan baru dengan membuat kurikulum untuk semua pendidikan di Polri baik dari kurikulum sekolah bintanga hingga Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri yang komprehensif (kedalaman materi), logis (silogisme berpikir), spesifik (metode yang khas), strategis, kemanfaatan dan novelty (kebaruan).

Setiap jenjang pendidikan mempunyai visi dan misi yang berbeda. Pada kurikulum Sespimmen Polri yang mengedepankan strategi pemecahan masalah kejahatan dimensi tinggi, perkembangan masyarakat yang pesat di era 4.0, banyaknya masyarakat yang terpapar kelompok radikal dan terorisme, globalisasi dan demokratisasi, kebijakan pimpinan Polri dengan pendidikan dan pelatihan yang presisi, hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil didik dan ancaman disintegrasi bangsa sehingga hasil didik Sespimmen Polri dapat tampil sebagai sosok pimpinan tingkat tinggi yang berilmu pengetahuan, mahir, terpuji, patuh hukum, unggul dan berintegritas yang mampu melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum) Polri adalah pendidikan untuk meningkatkan kompetensi manajerial, penguasaan ilmu pengetahuan, ilmu kepolisian dan teknologi kepolisian Pegawai Negeri pada Polri sesuai dengan jenjang jabatan dan kepangkatan yang merupakan pendidikan lanjutan setelah pendidikan pembentukan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri pada Polri agar memiliki pengetahuan, sikap kerja, kepemimpinan dan atau keterampilan teknis kepolisian.

Fenomena saat ini bahwa kurikulum yang ada dan dipakai pada pendidikan Sespimmen sudah usang (tidak *up to date*), salin dan tempel kurikulum dari tahun ke tahun sehingga diragukan kenoveltyannya.

Dalam rangka menjawab fenomena tersebut sehingga Lemdiklat Polri terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi personel Polri yang profesional, modern dan berintegritas. Lembaga pendidikan dan pelatihan Polri berbenah diri dengan memperbaiki aspek-aspek yang mempengaruhi SDM Polri, antara lain: aspek kultural, aspek struktural dan aspek instrumental dalam proses pendidikan.

Merujuk pada standar nasional pendidikan yang mensyaratkan dipenuhinya standar kompetensi, standar isi, standar proses dan standar penilaian, maka ditetapkan kurikulum dan silabus yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan Dikbangum.

Untuk memastikan ketepatan dan penggunaan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan Biro Kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan, dilakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi guna melakukan perbaikan kurikulum dan silabus bagi peningkatan kualitas pendidikan Dikbangum.

a. Kurikulum

1) Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin “curir” yang berarti palri dan “curere” yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek atau lajur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 19, 2003).

Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, dalam proses perencanaan biasanya menggunakan judgement ahli bidang studi untuk menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan pada peserta didik, tingkat kesulitan, minat peserta didik, urutan bahan pelajaran, dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menguasai materi pelajaran.

Menurut Sukmadinata, kurikulum mencakup semua pengalaman yang dilakukan peserta didik, dirancang, diarahkan, diberikan bimbingan dan dipertanggung jawabkan oleh sekolah. (Sukmadinata, 2003).

Dalam kegiatan pendidikan ini, kurikulum mencakup kegiatan belajar, di dalam kelas, diperpustakaan, dilapangan (Kuliah Kerja Profesi (KKP), Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN), Pelatihan Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas), Pelatihan Olah Strategi, dan Pelatihan Kepemimpinan), kegiatan pengasuhan dan kegiatan khusus.

Kemudian dijabarkan kembali dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. (Perkap nomor 14 , 2015).

Pengembangan kurikulum pada Polri dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan delapan program prioritas Lemdiklat Polri baik dari kurikulum sekolah bintanga hingga Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri yang komprehensif (kedalaman materi), logis (silogisme berpikir), spesifik (metode yang khas), strategis, kemanfaatan dan novelty (kebaruan).

2) Ketepatan rumusan kurikulum dan penggunaannya

a) Ketepatan rumusan kurikulum

- (1) Ketepatan tema pendidikan.
- (2) Ketepatan rumusan tujuan pendidikan.
- (3) Ketepatan rumusan profil lulusan.
- (4) Ketepatan rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- (5) Ketepatan penetapan struktur program kurikulum (perumpunan mata pelajaran).
- (6) Ketepatan penggunaan metoda pembelajaran.
- (7) Ketepatan beban belajar, lamanya pendidikan pendidikan dan jam pelajaran.
- (8) Ketepatan penilaian.

b) Penggunaan Kurikulum

- (1) Penggunaan kurikulum dalam pengambilan kebijakan kelembagaan.
- (2) Penggunaan kurikulum dalam pembinaan tenaga pendidik.
- (3) Penggunaan kurikulum dalam pembuatan jadwal dan penugasan tenaga pendidik..
- (4) Penggunaan kurikulum dalam pengasuhan.

c) Ketepatan silabus pembelajaran

- (1) Ketepatan penetapan kompetensi dan indikator.

- (2) Kesesuaian kompetensi dan indikator dengan materi pembelajaran (pokok bahasan dan sub pokok bahasan).
 - (3) Kesesuaian metoda dengan kompetensi dan materi pembelajaran.
 - (4) Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan metoda pembelajaran.
 - (5) Kesesuaian penilaian dengan kompetensi dan indikator pembelajaran.
 - (6) Kebaikan/keunggulan dan kelemahan silabus
- d) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah
 Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), merupakan sekolah pada Polri yang diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan Komisarisi Polisi agar memiliki kompetensi sebagai manajer dan pemimpin Polri tingkat tinggi. Dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Perwira Polri berpangkat Kompol dan AKBP, lulusan Akpol/SIP;
 - 2) Masa Dinas Perwira (MDP) paling singkat 15 tahun;
 - 3) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kompol paling singkat 2 tahun;
 - 4) usia maksimal 45 tahun;
 - 5) lulus pendidikan S-1 STIK/Sespimma paling rendah 2 tahun;
 - 6) memiliki SKHP yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda; (Kep Kalem diklat no. KEP/95/III/2021, 2021)
 - 7) diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah, kecuali yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
 - 8) memiliki Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori baik;
 - 9) ketentuan lebih lanjut ditentukan oleh Kapolri.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dengan kajian pustaka dengan berbagai sumber data baik berupa buku atau artikel yang berhubungan dengan tema penelitian. Waktu : 15 Oktober 2021. Kuesioner dilakukan melalui google form.

Sasaran pengawasan, pengendalian dan evaluasi adalah: Pimpinan satuan pendidikan (5 Responden), Widyaiswara (10-15 Responden), Peserta didik (20-30 Responden).

Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek pengawasan, pengendalian dan evaluasi, seperti hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi sumber data terkait ketepatan dan pemanfaatan kurikulum dan silabus. Kelebihan, kelemahan dan masalah terkait kurikulum dan silabus. Selain itu hasil observasi terhadap kondisi lokasi pengawasan, pengendalian dan evaluasi atau situasi/dinamika internal yang terjadi dalam pelaksanaan program.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi. observasi terhadap kondisi lokasi pengawasan, pengendalian dan evaluasi atau situasi/dinamika internal yang terjadi dalam pelaksanaan program.

Proses pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui:

- a. Studi Dokumen
 Bertujuan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi data dan informasi yang tersedia dalam bentuk dokumen, seperti desain pembelajaran, absensi peserta didik, hasil belajar peserta didik, dan produk tugas peserta didik.
- b. Observasi
 Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek/situasi dengan menggunakan pengamatan. Pengumpulan data melalui pengamatan dilakukan pada unit pelaksana pendidikan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan pemanfaatan kurikulum. Demikian juga pada proses program dilakukan observasi untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas tenaga pendidik dan peserta didik dalam

proses pembelajaran. Observasi dilakukan dengan memperhatikan peserta didik selama mengikuti pendidikan. Hasil akhir program dilakukan observasi untuk memperoleh data mengenai pencapaian kompetensi peserta didik.

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

Setelah mengisi kuesioner, selanjutnya dilakukan wawancara kepada para responden. dengan menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data/informasi pada penelitian kualitatif guna mengumpulkan suatu kelompok dan membahas suatu topik tertentu yang spesifik. Dari banyaknya responden yang terpilih itu, peneliti akan mengambil suatu kesimpulan dari pendapat berdasarkan topik yang ditentukan.

Hal ini berguna untuk mencocokkan jawaban yang telah diberikan oleh responden, apakah benar adanya atau hal lain.

FGD dilangsungkan selama 60–120 menit dan dapat dilakukan beberapa kali (Krueger, 1988). FGD merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog langsung antara evaluator dengan informan/sumber data yang dianggap dapat memberikan informasi/data tentang keadaan, opini maupun sikap yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Teknik ini dilakukan untuk menggali berbagai informasi yang tidak dapat diperoleh melalui dokumen maupun hasil observasi terhadap objek pengawasan, pengendalian dan evaluasi, meliputi:

1. Implementasi kurikulum sudah sesuai dengan kurikulum yang telah disahkan oleh Kalemndiklat Polri?
2. Hambatan dalam mengimplementasikan kurikulum?
3. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan situasi di lapangan saat ini?

d. Kuesioner

Kuesioner merupakan instrumen pengumpul data yang terdiri dari daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Kuesioner ini dibuat dan disebar untuk memperoleh data mengenai pengoperasian kurikulum dan silabus. Selain itu dapat diketahui kesesuaian implementasi kurikulum dalam pembelajaran.

e. Kisi-kisi Wasdal dan evaluasi

Kisi-kisi Wasdal dan evaluasi digunakan untuk membantu proses pengumpulan data, kisi-kisi ini dalam bentuk lembar observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan dan angket terbuka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan kurikulum dan penggunaannya, dapat dilihat dari pendapat pimpinan, Tenaga Pendidik (Gadik) dan Peserta Didik (Serdik) yang diperoleh dari isian angket dengan pilihan jawaban tepat dan perlu perbaikan.

Dari hasil pengisian kuesioner didapatkan hasil sebagai berikut:

A. Ketepatan dan Penggunaan Kurikulum

1. Ketepatan Kurikulum



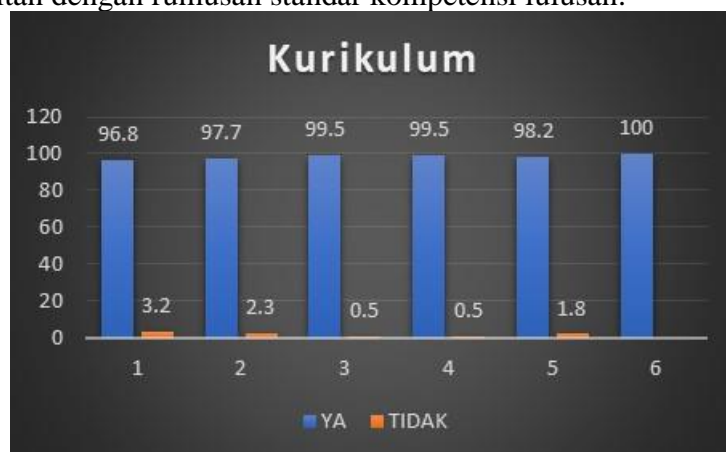
Grafik 1. Ketepatan Kurikulum Menurut Pimpinan

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa menurut pimpinan mengenai kurikulum dapat dikategorikan tepat dengan rata-rata **78,37%**. Yang dinyatakan paling tepat adalah rumusan profil lulusan dengan skor **89,5**. Sedangkan nilai yang paling rendah adalah rumusan standar kelulusan dengan skor **63,2**.



Grafik 2. Ketepatan Kurikulum menurut Gadik

Menurut Gadik mengenai kurikulum dapat dikategorikan tepat dengan rata-rata sebesar **84,25%**. Nilai yang memiliki skor paling tinggi, sebesar **99,9%** berkaitan dengan rumusan profil lulusan. Sedangkan nilai yang paling rendah, dengan skor **63%** berkaitan dengan rumusan standar kompetensi lulusan.



Grafik 3. Ketepatan Kurikulum Menurut Peserta Didik

Menurut Serdik, kurikulum dapat dikategorikan tepat dengan rata-rata **98,61%**, nilai yang paling tinggi 100 mengenai Saya memperoleh mata pelajaran ilmu manajemen dan kepemimpinan. Sedangkan nilai yang paling rendah adalah 96,8 mengenai komposisi mata pelajaran yang diajarkan proposional.

2. Penggunaan Kurikulum Oleh Pimpinan

Menurut pimpinan kurikulum digunakan sebagai dasar dalam mengelola Pendidikan, dengan nilai sebesar 97,9%. Penggunaan kurikulum memiliki skor paling

tinggi, yaitu sebesar 100%. Sedangkan nilai yang paling rendah adalah 89,5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik di bawah ini:



Grafik 4. Penggunaan Kurikulum Oleh Pimpinan

3. Masalah dalam implementasi kurikulum

- a. Kurikulum belum sesuai dengan profil yang ditetapkan dan penyusunannya belum sesuai dengan tahapan pembelajaran.
- b. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis KKNI walaupun sudah disetarakan namun kompetensi yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan level KKNI.
- c. Pengelompokan mata pelajaran dalam Kurikulum belum sesuai dengan tahapan Pendidikan, sehingga ketercapaian kompetensi.
- d. Belum sepenuhnya widyaiswara memahami pentingnya kurikulum, silabus dan bahan ajar yang berfungsi sebagai rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran.
- e. Kurikulum program matrikulasi (RPL) belum sesuai dengan program reguler khususnya terkait dengan kegiatan pelatihan.

B. Tanggapan Terhadap Silabus

1. Silabus menurut Widyaiswara

Menurut Widyaiswara silabus dapat dikatagotikan tepat dengan rata-rata 85,72%. Skor yang paling tinggi adalah ketepatan rumusan kompetensi, sebesar 98,26% Sedangkan nilai yang paling rendah adalah kesesuaian metoda dan kompetensi sebesar 81,25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:



Grafik 5. Tanggapan Widyaiswara Terhadap Silabus

2. Masalah dalam implementasi silabus

- a. Silabus belum sepenuhnya dijadikan rujukan oleh para narasumber dalam penyusunan materi pelajaran, sehingga silabus tidak berfungsi.
- b. Tidak semua widyaiswara memahami implementasi silabus dalam pembelajaran, sehingga perlu dilakukan pelatihan/penyegaran yang melibatkan pihak luar sehingga pelaksanaannya benar-benar maksimal.

- c. Penyusunan silabus belum melibatkan Widyaiswara secara optimal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kurikulum dan penggunaannya

Berdasar penilaian pimpinan (78,37%), dosen (84,25%), dan peserta didik (98,61%) kurikulum terkategori tepat, walau masih terdapat hal hal yang perlu diperbaiki, diantaranya adalah : (1) Standar kelulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan) ; (2) Beban belajar dan pengelompokan mata pelajaran; serta (3) Sistem penilaian. Kurikulum hampir sepenuhnya (91,83%) digunakan pimpinan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan dan pembinaan para Widyaiswara.

B. Silabus dan penggunaannya

Berdasar penilaian Widyaiswara sudah tepat (85,72%), walau terdapat beberapa hal harus diperbaiki, diantaranya: (1) Sosialisasi silabus pada pengampu mata pelajaran belum dilakukan secara optimal sehingga seringkali silabus tidak digunakan dalam pembelajaran; (2) Penetapan kompetensi lulusan dan pengelompokan mata pelajaran belum tepat; (3) Penyusunan silabus belum melibatkan Widyaiswara secara optimal.

5. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi implementasi kurikulum pada pendidikan dan pengembangan umum sekolah staf dan pimpinan tinggi kepolisian negara Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kurikulum sudah sangat bagus dan dapat mendukung penugasan dilapangan nantinya.
- b. Sistematika kurikulum sesuai dengan perkembangan kebijakan kurikulum yang berbasis KKNI dan Pendidikan kedinasan.
- c. Diperlukan penelitian evaluasi tentang implemetasi kurikulum secara berlanjut dalam upaya dalam perbaikan atau pengembangan kurikulum.

Dengan demikian diharapkan dalam pembuatan kurikulum ditahun yang akan datang khususnya untuk pendidikan pengembangan umum Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri, implementasi kurikulum dan kebijakan kepolisian yang sesuai dengan tuntutan di masyarakat, kegiatan dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama Polri dengan K/L lainnya termasuk pelatihan-pelatihan, pembekalan dan bentuk kerjasama dalam mendukung tugas Polri.